

WACANA KEKUASAAN DAN KESEWENANGAN PEMERINTAH DALAM VIDEOKLIP BERTEMA KRITIK POLITIK

Christheo Royan Sianipar¹, Windri Saifudin²

^{1,2} Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Politik
Universitas Pembangunan Negeri Veteran Jawa Timur

122043010104@student.upnjatim.ac.id, 2windri.saifudin.ilkom@upnjatim.ac.id

ABSTRACT

Indonesia's socio-political dynamics in recent years reflect an increasingly complex power landscape, marked by democratic index decline, controversy over Constitutional Court Decision No. 90/PUU-XXI/2023, and various structural problems including corruption, nepotism, and weak law enforcement. This research analyzes the discourse of power and government arbitrariness constructed in three politically critical music videos: Republik Fufufafa by Slank, Bangun Orang Waras by Methosa, and Menteri Durmagati by Kajawi. The study focuses on three main perspectives: (1) the critical viewpoint embedded in the music and lyrics; (2) the construction of power and arbitrariness of rulers; and (3) the impact of such power on society. Using a descriptive qualitative method with a critical paradigm and Norman Fairclough's Critical Discourse Analysis (CDA) model covering three dimensions of text, discursive practice, and social practice, this study finds that all three music videos construct a critical discourse through the portrayal of state chaos arising from deviant power practices, the arbitrariness of rulers obtained through legal manipulation and nepotism, and the people as victims bearing the consequences of corruption across multiple sectors ranging from food, education, employment, to infrastructure. The study demonstrates that politically critical music videos can serve as an effective alternative medium for representing the relationship between power, the state, and society, while fostering public critical awareness.

Keywords: Critical Discourse, Power, Government Arbitrariness, Music Video, Political Criticism, Norman Fairclough

ABSTRAK

Dinamika sosial-politik Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mencerminkan lanskap kekuasaan yang semakin kompleks, ditandai oleh penurunan indeks demokrasi, kontroversi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, serta berbagai persoalan struktural seperti korupsi, nepotisme, dan lemahnya penegakan hukum. Penelitian ini menganalisis wacana kekuasaan dan kesewenangan pemerintah yang dikonstruksi dalam tiga videoklip bertema kritik politik: Republik Fufufafa karya Slank, Bangun Orang Waras karya Methosa, dan Menteri Durmagati karya Kajawi. Penelitian ini berfokus pada tiga perspektif utama yaitu sudut pandang kritik yang tertanam dalam musik dan lirik, konstruksi kekuasaan dan kesewenangan penguasa, serta dampak kekuasaan tersebut terhadap masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan paradigma kritis. Melalui Analisis Wacana Kritis model Norman Fairclough mencakup tiga dimensi teks, praktik diskursif, dan praktik sosial, penelitian ini menemukan bahwa ketiga videoklip membangun wacana kritis melalui gambaran

kekacauan negara akibat praktik kekuasaan yang menyimpang, kesewenangan penguasa yang diperoleh melalui manipulasi hukum dan nepotisme, serta rakyat sebagai korban yang menanggung dampak korupsi di berbagai sektor mulai dari pangan, pendidikan, ketenagakerjaan, hingga infrastruktur. Penelitian ini menunjukkan bahwa videoklip bertemakan kritik politik mampu berfungsi sebagai media alternatif yang efektif dalam merepresentasikan relasi kekuasaan, negara, dan masyarakat, sekaligus mendorong kesadaran kritis publik.

Kata Kunci: Wacana Kritis, Kekuasaan, Kesewenangan Pemerintah, Videoklip, Kritik Politik, Norman Fairclough

A. Pendahuluan

Dinamika sosial politik Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kondisi yang semakin kompleks. Penurunan pada aspek kebebasan dan kesetaraan dalam indeks demokrasi, kontroversi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang memunculkan tuduhan konflik kepentingan, serta berbagai persoalan struktural seperti pengangguran, ketimpangan ekonomi, dan lemahnya penegakan hukum menjadi fenomena yang mendapat perhatian publik secara luas. Kondisi ini mendorong munculnya beragam ekspresi kritik masyarakat, salah satunya melalui produk budaya populer berupa musik.

Musik memiliki posisi strategis karena kemampuannya untuk menjangkau masyarakat secara luas dan lintas kelas sosial (Sihabuddin et al., 2020). Melalui lirik, melodi, dan

aransemen, pesan-pesan tertentu dikonstruksi dan disampaikan secara simbolik sehingga dapat dimaknai masyarakat sesuai konteks sosial dan pengalaman individu. Musik dapat menjadi media untuk mengekspresikan emosi, membentuk identitas sekaligus merepresentasikan realitas sosial (R. I. Putra et al., 2025). Setyawan & Ansori (2024) menyebutkan bahwa karya musik sering muncul sebagai respons terhadap ketimpangan sosial, konflik politik, maupun dominasi kekuasaan.

Tiga videoklip yang menjadi objek dalam penelitian ini Republik Fufufafa karya Slank yang dirilis pada bulan Desember 2025, Bangun Orang Waras karya Methosa yang dirilis pada bulan Oktober 2024, dan Menteri Durmagati karya Kajawi yang rilis pada bulan Oktober 2025 hadir sebagai respons kreatif atas

kegelisahan publik terhadap praktik kekuasaan yang dinilai tidak adil dan tidak transparan. Ketiganya secara eksplisit menyuarakan kritik terhadap pemerintah melalui lirik yang satir, simbolisme yang kuat, dan visualisasi yang provokatif.

Penelitian ini berfokus pada tiga perspektif utama yang saling berkaitan yaitu sudut pandang kritik yang dibangun dalam videoklip terhadap pemerintah dan kekuasaan, representasi kekuasaan serta kesewenangan penguasa melalui lirik dan visual, serta dampak nyata praktik kekuasaan tersebut terhadap berbagai kelompok masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami bagaimana wacana kekuasaan dan kesewenangan pemerintah dikonstruksi dalam ketiga videoklip bertema kritik politik tersebut melalui perspektif Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan paradigma kritis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan menelusuri bagaimana wacana,

bahasa, dan praktik kekuasaan terbentuk serta disampaikan melalui teks dan media (Firmansyah et al., 2021). Paradigma kritis digunakan karena penelitian tidak hanya menjelaskan fenomena secara deskriptif, tetapi juga menelusuri bagaimana kekuasaan dan ideologi tersirat tercermin dalam bahasa dan praktik komunikasi.

Metode analisis yang digunakan adalah Analisis Wacana Kritis (AWK) model Norman Fairclough, yang mencakup tiga dimensi saling berkaitan: (1) Teks dengan analisis pilihan kata, gaya bahasa, metafora, dan alur cerita dalam lirik serta visual videoklip, (2) Praktik Diskursif yang mengkaji bagaimana teks diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi publik, termasuk latar belakang pencipta dan konteks produksi, dan (3) Praktik Sosial yaitu menelusuri konteks sosial politik yang mempengaruhi makna dan dampak sosial dari ketiga videoklip tersebut.

Data dikumpulkan melalui tiga teknik: (1) studi pustaka terhadap jurnal ilmiah, literatur, dan karya akademik relevan; (2) dokumentasi melalui pengamatan cermat terhadap

lirik dan videoklip yang diakses melalui YouTube; dan (3) observasi mendalam dengan mencatat simbol, frasa, dan adegan yang merepresentasikan kekuasaan dan kesewenangan pemerintah. Corpus penelitian adalah lirik beserta videoklip dari ketiga lagu tersebut, dengan fokus pada scene dan lirik yang memuat elemen-elemen kekuasaan, kritik, dan dampaknya terhadap masyarakat.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Videoklip sebagai Medium Kritik Politik

Ketiga videoklip yang diteliti memposisikan diri secara eksplisit sebagai medium kritik terhadap pemerintah dan praktik kekuasaan. Menurut Cahya & Sukendro (2022), melalui musik, videoklip dapat mengantarkan kritik yang serius namun tetap mudah diterima dan dinikmati publik. Sudut pandang (POV) kritik yang dibangun dalam ketiga videoklip ini tidak bersifat netral, melainkan secara tegas memihak pada masyarakat yang merasakan dampak dari kesewenangan kekuasaan.

Dalam Republik Fufufafa, Slank membangun POV kritik melalui lirik "*Aku lahir di negeri kacau balau*". Penggunaan kata "aku lahir di" menunjukkan bahwa narator bukan sekadar pengamat, tetapi bagian dari realitas yang dikritik dan menjadi sebuah strategi diskursif yang membuat lirik terasa lebih personal dan mengundang identifikasi dari pendengar. Pilihan visual berupa riasan wajah Joker oleh seluruh anggota band memperkuat posisi sebagai arketipe *trickster* yang menantang tatanan sosial dan mengungkap kontradiksi ketidakadilan (Pratiwi, 2023). Melalui simbol ini, Slank menyatakan secara visual bahwa kondisi yang mereka gambarkan bukanlah situasi normal, melainkan pertunjukan absurd yang menuntut perlawanan.

Bangun Orang Waras membangun POV kritik yang paling langsung dan konfrontatif. Judulnya sendiri adalah ajakan "bangun" bermakna ganda yaitu bangun dari tidur (tersadar) dan bangun dalam arti membangun (membangun kesadaran). Methosa menggunakan struktur lirik yang menyapa langsung berbagai kelompok masyarakat dengan liriknya "*Hey pak petani... Hey*

pak guru... Hey pemuda... Hey para buruh..." Penyapaan langsung ini berfungsi sebagai strategi wacana yang menarik pendengar untuk masuk ke dalam narasi dan merasakan relevansi personal dari kritik yang disampaikan. POV yang dibangun adalah POV rakyat biasa yang lelah dan mempertanyakan sistem.

Menteri Durmagati memilih POV kritik yang lebih tidak langsung namun tetap tajam melalui tradisi *pasemon* Jawa cara menyampaikan kritik melalui perumpamaan dan simbol agar tidak memicu konflik terbuka (Malik, 2023). Dengan menggunakan tokoh pewayangan Durmagati yang berasal dari kata "dur" yaitu buruk dan "magati" yaitu jalan, yang memiliki makna seseorang yang berjalan di jalan yang salah. Sengkuni yang menjadi simbol kelicikan dan manipulasi. Dengan menggunakan tokoh pewayangan, Kajawi membangun kritik yang berlapis. Bagi pendengar awam terdengar sebagai cerita budaya, tetapi bagi yang memahami konteks politik, pesan kritiknya terasa sangat tajam.

2. Konstruksi Kekuasaan dan Kesewenangan Penguasa

Kekuasaan dipahami sebagai kemampuan seseorang atau kelompok untuk memengaruhi, mengarahkan, atau mengendalikan tindakan pihak lain, baik melalui kewenangan resmi maupun cara-cara tidak formal (Ramadhani & Kumala, 2026). Dalam ketiga videoklip yang diteliti, kekuasaan direpresentasikan bukan sebagai sesuatu yang diperoleh melalui proses demokrasi yang adil, melainkan melalui manipulasi institusi hukum, nepotisme, dan jaringan kepentingan elite.

Dalam Republik Fufufafa, konstruksi kekuasaan yang paling kuat tampak pada penggunaan istilah "Fufufafa". Fufufafa merupakan sebuah nama akun anonim di platform Kaskus yang dikaitkan dengan figur tertentu dalam kontestasi politik Indonesia 2024. Repetisi kata "*Fufufafa republik*" dalam lirik bukan sekadar estetika musikal, melainkan pilihan wacana yang disengaja untuk menanamkan asosiasi antara kata tersebut dengan praktik kekuasaan yang manipulatif. Lagu ini merujuk pada kontroversi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dianggap membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka untuk maju

sebagai calon wakil presiden, meskipun usianya belum memenuhi persyaratan minimum yang sebelumnya berlaku (Roby Setiadi, 2024). Banyak pihak mempertanyakan netralitas putusan tersebut karena adanya hubungan keluarga antara Presiden Joko Widodo dengan Gibran, serta fakta bahwa Ketua Hakim Anwar Usman adalah paman dari Gibran (Rizky et al., 2024).

Lirik "*Sakau kuasa*" dalam Republik Fufufafa merupakan metafora yang kuat. Dalam istilah medis "sakau" adalah kondisi sakit fisik akibat ketergantungan zat yang kemudian dipindahkan ke ranah politik untuk menggambarkan penguasa yang tidak lagi mampu bertindak rasional demi kepentingan publik karena ketagihan kekuasaan itu sendiri. Penguasa tidak lagi dipersepsikan sebagai pelayan publik, melainkan sebagai individu yang mengalami ketergantungan terhadap kekuasaan. Adegan seseorang yang berendam di atas tumpukan uang memperkuat simbol "sumber daya yang seharusnya untuk kepentingan masyarakat justru dinikmati secara pribadi.

Bangun Orang Waras mengonstruksi kekuasaan yang bekerja melalui mekanisme eksklusif yang mengabaikan kompetensi. Lirik "*Modal ijazah atau dibantu ayah*" mengkritik praktik nepotisme di mana koneksi kekuasaan lebih menentukan dari kompetensi. Istilah "dibantu ayah" menunjukkan keistimewaan berbasis koneksi keluarga, sementara "modal ijazah" merujuk pada jalur resmi berbasis kemampuan. Perbandingan keduanya memperlihatkan bahwa sistem yang ada tidak adil karena hubungan dan koneksi justru lebih berpengaruh (Jisman, 2022). Frasa "*demokrasi sudah basi*" dan "*hukum memang buta tapi kenal transaksi*" memperlihatkan bahwa lembaga-lembaga negara yang seharusnya menjamin keadilan kini dipandang telah kehilangan integritas dan dapat dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi dan relasi kuasa.

Menteri Durmagati merepresentasikan kesewenangan kekuasaan paling eksplisit. Lirik "*Sengkuni paring warta, dana buta proyek negara*" memiliki arti "Sengkuni memberi informasi, dana besar proyek negara". Lirik tersebut menggambarkan bagaimana informasi tentang sumber daya

negara beredar di kalangan elite sebagai alat memperkuat kekuasaan. Lirik "*Ala saithik, penting ra ketara*" memiliki arti "Ambil sedikit, yang penting tidak ketahuan". Lirik tersebut memperlihatkan bahwa korupsi telah dinormalisasi dan dianggap wajar selama tidak terdeteksi. Ini merepresentasikan kondisi di mana kekuasaan digunakan untuk mendistribusikan keuntungan bagi kelompok elite, bukan untuk kesejahteraan publik. Visual dalam videoklip yang menampilkan teks "*Ojo lali 15% kuwi jatahe paman lo ya?*" memiliki arti "Jangan lupa, 15% itu bagian jatah paman, ya" dan menunjukkan bahwa pembagian keuntungan korupsi dilakukan secara terukur dan terorganisasi, seolah sudah menjadi kesepakatan dalam pengelolaan proyek negara.

3. Dampak Kekuasaan Terhadap Masyarakat

Ketiga videoklip secara konsisten menempatkan rakyat sebagai pihak yang paling merasakan dampak dari kesewenangan penguasa dan penyalahgunaan kekuasaan. Namun menariknya, rakyat tidak hanya digambarkan sebagai korban pasif, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki

kesadaran kritis dan ditunjukkan melalui lirik yang menyapa, mempertanyakan, dan mengajak tersadar.

Republik Fufufafa menyoroti dampak kegagalan negara pada generasi secara kolektif. Lirik "*Negeri stunting dan kurang gizi*" merujuk pada realitas bahwa prevalensi stunting balita Indonesia masih berada di angka 19,8% pada tahun 2024 (Kemenkes, 2025). Kondisi ini bukan sekadar masalah kesehatan, melainkan tanda kegagalan sistemik. Ketika anggaran kesehatan dikorupsi, yang menjadi korban pertama adalah kelompok paling rentan yaitu anak-anak dari keluarga miskin. Lirik "*IQ rata-rata setara dengan monkey*" kemudian menjadi peringatan keras bahwa kegagalan negara dalam bidang gizi berdampak langsung pada kualitas berpikir masyarakat secara kolektif, karena stunting terbukti menurunkan kemampuan kognitif anak secara signifikan (Daracantika, 2021). Adegan operasi pada seekor monyet memperkuat makna simbolik bahwa ada kerusakan sistemik dalam struktur pendidikan yang perlu "dibenahi" secara mendasar.

Bangun Orang Waras memberikan gambaran paling komprehensif mengenai dampak kekuasaan terhadap berbagai kelompok masyarakat. Petani menghadapi mahalnya pupuk non-subsidi (Rp6.000–Rp6.500/kg dibanding Rp1.800/kg harga subsidi, berdasarkan data Pupuk Indonesia, 2025) di satu sisi, sementara kebijakan impor beras membuat harga gabah lokal tertekan. Kondisi tersebut mencerminkan kebijakan pangan yang lebih memberi jalan bagi importir daripada melindungi petani. Guru honorer menjalankan tugas yang sama dengan guru ASN namun hanya menerima gaji Rp1-5 juta per bulan, dibanding Rp4-12 juta untuk guru PNS (YBKB, 2023). Kondisi tersebut menjadi sebuah ketidakadilan struktural yang berulang karena sistem pendidikan selama bertahun-tahun bergantung pada tenaga guru honorer sebagai tenaga murah tanpa memberikan perlindungan yang sepadan. Pemuda menghadapi tingkat pengangguran 11,78% untuk kelompok usia 16–30 tahun pada 2025, dan harus bersaing dengan praktik nepotisme dalam dunia kerja. Buruh tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga karena

kenaikan upah minimum tidak sebanding dengan inflasi harga kebutuhan pokok dan diperparah dengan data 23.470 pekerja ter-PHK pada periode Januari–Mei 2026 (Kemnaker).

Menteri Durmagati menggambarkan dampak korupsi pada kualitas layanan publik secara paling gamblang. Lirik "*Infrastruktur sukur dadi, kualitas ra peduli, penting rakyat ora ngerti*" memiliki arti "Infrastruktur yang penting jadi, kualitas tidak peduli, yang penting rakyat tidak tahu". Lirik tersebut menggambarkan pola korupsi di mana dana proyek diselewengkan, dengan contoh seperti kasus korupsi proyek BTS 4G Kominfo yang merugikan negara Rp8,03 triliun (Chaterine & Rastika, 2023), atau kasus korupsi proyek jalan di Sumatera Utara senilai Rp231,8 miliar (Liputan6, 2025). Rakyat menanggung dampaknya melalui infrastruktur berkualitas buruk yang memperlambat akses petani ke pasar, mempersulit buruh menjangkau tempat kerja, dan menghambat anak-anak pergi ke sekolah.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa videoklip Republik Fufufafa, Bangun Orang Waras, dan Menteri Durmagati secara konsisten membangun wacana kritis tentang kekuasaan dan kesewenangan pemerintah melalui tiga perspektif yang saling berkaitan.

Pertama, dari segi POV kritik, ketiga videoklip memposisikan diri secara eksplisit sebagai medium perlawanan terhadap praktik kekuasaan yang menyimpang. Masing-masing video klip menggunakan strategi wacana yang berbeda, contohnya pada lagu Republik Fufufafa yang menggunakan simbolisme Joker, Lagu Bangun Orang Waras menggunakan penyapaan langsung kepada kelompok masyarakat terdampak, dan lagu Menteri Durmagati yang mengadopsi tradisi pasemon Jawa melalui simbolisme pewayangan.

Kedua, dari segi kekuasaan dan kesewenangan, ketiga videoklip merepresentasikan kekuasaan yang diperoleh dan dipertahankan melalui manipulasi institusi hukum, nepotisme, dan jaringan kepentingan elite. Korupsi direpresentasikan

sebagai bagian yang telah dinormalisasi dalam sistem kekuasaan.

Ketiga, dari segi dampak terhadap masyarakat, ketiga videoklip menampilkan kondisi rakyat. Kondisi tersebut digambarkan melalui petani, guru, pemuda, buruh, masyarakat adat. Masyarakat tersebut menjadi pihak yang menanggung secara nyata konsekuensi dari kekuasaan yang disalahgunakan. Mulai dari stunting akibat korupsi anggaran kesehatan, guru honorer bergaji rendah, pemuda menganggur yang menghadapi nepotisme, hingga infrastruktur rusak akibat korupsi proyek.

Penelitian ini menunjukkan bahwa musik dan videoklip bertema kritik politik mampu berfungsi sebagai wacana yang efektif dalam merepresentasikan relasi antara kekuasaan, negara, dan masyarakat, sekaligus menjadi media alternatif dalam mendorong kesadaran kritis publik terhadap praktik kekuasaan yang tidak adil.

DAFTAR PUSTAKA

Cahya, S. I. A., & Sukendro, G. G. (2022). Musik Sebagai Media Komunikasi Ekspresi Cinta. *Koneksi*, 6(2), 246–254.

- Chaterine, R. N., & Rastika, I. (2023). Kaleidoskop 2023: Kasus Korupsi BTS 4G Kominfo. Kompas.com.
- Daracantika, A. (2021). Systematic Literature Review: Pengaruh Negatif Stunting terhadap Perkembangan Kognitif Anak. *Jurnal Biostatistik, Kependudukan, dan Informatika Kesehatan*, 1(2).
- Firmansyah, M., Masrun, M., & Yudha S, I. D. K. (2021). Esensi Perbedaan Metode Kualitatif Dan Kuantitatif. *Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(2), 156–159.
- Ilmiawan. (2024). Wacana dan Kekuasaan: Peran Bahasa Dalam Menciptakan Realitas Sosial. *Jurnal Sastra Dan Bahasa*, 3, 333–338.
- Jisman, J. (2022). Praktek Kolusi dan Nepotisme Dalam Birokrasi. *PARADIGMA: Jurnal Administrasi Publik*, 1(2), 93–108.
- Kemendes. (2025). SSGI 2024: Prevalensi Stunting Nasional Turun Menjadi 19,8%. <https://kemkes.go.id>
- Liputan6. (2025). Korupsi Proyek Jalan di Sumut, KPK Tetapkan 5 Tersangka. Liputan6.com.
- Malik, D. M. A. P. (2023). Pasemon dalam Seni Pertunjukan Gambus Misri Jombang: Kajian Etnosemantik Bahasa Rakyat, 19(3), 113–130.
- Pratiwi, A. S. A. F. S. Z. N. W. I. L. M. D. A. P. R. K. T. L. (2023). Not A Joke: Clown Archetypes Of Joker. *Journal Nusantara*, 1(1), 95.
- Pupuk Indonesia. (2025). Penetapan HET 2025 untuk Urea, NPK, ZA dan Pupuk Organik. <https://www.pupuk-indonesia.com>
- Putra, R. I., Indah, T., & Maulana, M. (2025). Seni Musik Sebagai Kritik Sosial Melalui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Oleh Band Sukatani. *Jurnal Sarjana Ilmu Komunikasi*, 6(2), 416–431.
- Ramadhani, F., & Kumala, A. N. (2026). Wacana kekuasaan dan pengetahuan dalam representasi disabilitas. *Jurnal Penelitian Bahasa*, 11(11).
- Rizky, M. F., Yuhermasyah, E., & Umur, A. (2024). Konflik Kepentingan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. *Maqasidi*, 4(1), 142–151.
- Roby Setiadi. (2024). Kontroversi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. *Jurnal Hukum*, 2, 277–284.
- Rohmah, N., Mulyono, N., & Surahman, H. (2025). Kritik Sosial Pada Lirik Lagu Album Kausa Nusantara Karya Band Methosa. *Jurnal Sastra*, 15, 265–273.
- Setyawan, A., & Ansori, T. (2024). Kritik Sosial dalam Lirik Lagu "Seperti Rahim Ibu" Karya Band Efek Rumah Kaca. *Jurnal Communication Studies*, 4(1), 16–30.
- Sihabuddin, Itasari, A. A., Herawati, D. M., & Aji, H. K. (2020). Hubungan Erat Antara Komunikasi dengan Musik. *Translitera: Jurnal Kajian Komunikasi Dan Studi Media*, 12(1), 55–62.
- YBKB. (2023). Gaji Guru di Indonesia vs Dunia. Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa. <https://www.ybkb.or.id>